

PROPOSAL PENELITIAN

DAMPAK PROGRAM USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KAMPUNG TENGAH KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU



TIM PENGUSUL

Ketua	: Nany Librianty	NIDN. 1005106804
Anggota	: Bustami	NIDN. 1014087402
	- Saftina Ridayanti	NIM. 2094202007
	- Shofiah Amanda	NIM. 2094202012

**PROGRAM STUDI KEWIRAUSAHAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
2021**

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Dampak Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK- SP) terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

2. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi
1.	Nany Librianty, SE, M.MA	Dosen	Manajemen	Kewirausahaan
2.	Bustami, SE, M.Si	Dosen	Manajemen	Kewirausahaan

3. Objek Penelitian penciptaan (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan Nopember 2021

Berakhir : bulan Januari 2021

5. Lokasi Penelitian (lab/lapangan) Pekanbaru Kota

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)

8. Skala perubahan dan peningkatan kapasitas sosial kemasyarakatan dan atau pendidikan yang ditargetkan

- Peningkatan Pendapatan Masyarakat

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi)

- jurnal ekonomi (nasional terakreditasi)

BIODATA PENELITI

Nama : Nany Librianty, SE, M.MA
Jabatan : Ketua Peneliti
TTL : Bangkinang, 05 Oktober 1968
Alamat Rumah : Jl. Prof. M.Yamin, SH Gang HW No.289
Bangkinang Kampar -Riau
Hp : 081277712797
Alamat PT : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-
Riau
Email : nanilibrianti@rocketmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, dan Doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
1995	Sarjana	Universitas Islam Riau	Manajemen
2015	Magister	Universitas Islam Riau	Manajemen Agribisnis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	8
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat.....	13
2.1.3. Kasus-Kasus Program Pemberdayaan Masyarakat.....	20
2.2. Kredit Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP).....	22
2.3. Analisis Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat.....	26
2.3.1. Pendapatan Usaha.....	26
2.3.2. Penyerapan Tenaga Kerja.....	27
2.4. Penelitian Terdahulu.....	27
2.5. Kerangka Pemikiran.....	29
2.6. Hipotesis.....	31
III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode, Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
3.2. Teknik Pengambilan Sampel.....	32
3.3. Jenis dan Sumber Data	33

3.4.	Ruang Lingkup Penelitian	33
3.5.	Konsep Operasional.....	34
3.6.	Metode Analisis Data	35
3.6.1.	Analisis Karakteristik dan Profil Pemanfaat Kredit.....	35
3.6.2.	Analisis Profil Usaha Pemanfaat Kredit UEK-SP.....	35
3.6.3.	Analisis Kinerja Program UEK-SP.....	35
3.6.4.	Analisis Dampak Program UEK-SP terhadap Pemanfaat Kredit	36
3.7.	Validitas Instrumen dan Reliabilitas Instrumen.....	37
3.7.1.	Validitas Instrumen (Uji Validitas).....	37
3.7.2.	Reliabilitas Instrumen (Uji Reliabilitas).....	38

BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1.	Biaya dan Jadwal Penelitian	
------	-----------------------------------	--

DAFTAR PUSTAKA.....	40
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan menjadi salah satu problem sosial yang amat serius. Pada masa lalu, umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kekurangan pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern saat ini mereka tidak memiliki fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulailuntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja maka salah satu jalan adalah dengan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi Kelurahan, pengembangan Lembaga Keuangan Kelurahan, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*), yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah mencanangkan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terdiri dari Program Pemberdayaan Kelurahan, Program Pemberdayaan Perkotaan, serta Program Pemberdayaan wilayah khusus dan Kelurahan tertinggal. Pendekatan Program Pemberdayaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selamaini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi

kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru merupakan salah satu kelurahan yang termasuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Kelurahan karena pekerjaan masyarakatnya yang beragam mulai dari petani, pedagang, buruh ataupun sopir. Pekerjaan masyarakat di daerah ini yang paling dominan adalah berdagang, dan pada umumnya modal untuk usaha tersebut dipinjam pada bank, baik sebagai modal awal maupun juga untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Riau (2011), Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru diketahui bahwa jumlah penduduk pada tahun 2010 berjumlah 28.357 jiwa terdiri dari 8.306 KK, laki-laki 14.032 jiwa, perempuan 14.325 jiwa. Jumlah penduduk miskin terdapat sebanyak 4.368 jiwa dengan jumlah KK miskin sebanyak 978 KK. Program Pemberdayaan Kelurahan sebagai program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sukajadi lebih mengutamakan pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi objek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka.

Tabel 1. Rincian Jenis Usaha Pemanfaat UEK-SP Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

No	Jenis Usaha Pemanfaat	Jumlah Pemanfaat (Orang)
1.	Pedagang	402
2.	Perkebunan	2
3.	Perikanan	5
4.	Industri Kecil	79
5.	Jasa	160
Jumlah		648
Total dana yang dipinjam		Rp. 4.435.500.000

Sumber : UEK-SP Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

Data yang diperoleh dari pengurus UEK-SP Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru sampai Februari 2014, diketahui bahwa total pemanfaat berjumlah 648 orang dengan jenis usaha dominan adalah perdagangan dan jasa. Total dana yang dipinjam pemanfaat sebesar Rp. 4.435.500.000.

Program Pemberdayaan Kelurahan diharapkan membawa perubahan yang positif baik dalam masalah lingkungan maupun perihal keberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa alasan mengapa Program Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru menarik untuk dibahas.

Pertama, masalah kemiskinan adalah permasalahan global yang hampir dialami oleh semua Negara di dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu kemiskinan adalah permasalahan yang selalu menarik untuk dikaji guna menemukan solusi penanggulangannya, khususnya di Kecamatan Sukajadi.

Kedua, Program Pemberdayaan Kelurahan dianggap sebagai solusi program dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan setelah program-program pemerintah yang sebelumnya dianggap kurang atau tidak mampu menekan angka kemiskinan secara maksimal.

Ketiga, Program Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Sukajadi terkesan belum berjalan dengan maksimal seperti apa yang menjadi tujuan, prinsip, dan sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah sering diartikan sebagai pembatasan masalah atau formulasi data. Rumusan masalah mencerminkan masalah pokok penelitian (Sudarwan Danim, 2002). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah karakteristik dan profil usaha penerima kredit Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana kinerja pemberdayaan bagi pemanfaat kredit UEK-SP ?

3. Bagaimanakah dampak Program Pemberdayaan Kelurahan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Karakteristik dan profil usaha pemanfaat kredit UEK-SP di Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.
2. Kinerja Program Pemberdayaan bagi Pemanfaat Kredit UEK-SP di Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan membandingkannya dengan konsep terkini.
3. Dampak Program Pemberdayaan Kelurahan terhadap peningkatan pendapatan usaha, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan penghasilan anggota kelompok.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Pengembangan teori-teori tentang dampak UEK-SP terhadap peningkatan pendapatan pemanfaat UEK-SP.
2. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan tentang UEK-SP di Kota Pekanbaru.
3. Sebagai bahan informasi tentang profil masyarakat penerima dana UEK-SP serta untuk memberi informasi bagi masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka melalui Program Pemberdayaan Kelurahan.
4. Sebagai bahan masukan bagi pelengkap referensi maupun bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian di bidang yang sama.

1.5 Ruang Lingkup Sebelum dan Sesudah Menggunakan Kredit UEK-SP

Pada penelitian ini ruang lingkup kegiatan UEK-SP sebelum dan sesudah pemberdayaan UEK-SP kepada pemanfaat kredit yang menggunakan kredit UEK-SP sebelum tahun 2017 dan sesudah pemanfaat kredit yang menggunakan kredit UEK-SP dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan (Hutomo, 2000).

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono dan Pranarka, 1996).

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Usaha ekonomi masyarakat kelurahan merupakan

salah satu pilar penggerak perekonomian masyarakat di kelurahan yang diyakini mampu bertahan di tengah tengah krisis yang melanda perekonomian suatu negara, karena pengelolaannya langsung dan jauh dari intimidasi pihak luar. Pemerintah selalu berusaha memroteksinya sebagai upaya keseriusan Pemerintah dalam melindungi eksistensi perekonomian masyarakat.

Usaha ekonomi masyarakat kelurahan adalah cerminan dari watak dan karakter perekonomian bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam pengelolaan bahkan pengembangannya. Pegelolaan usaha ekonomi masyarakat diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat kelurahan dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Karena itu, pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dilakukan dengan baik dan jauh dari upaya yang mengeksploitasi potensi ekonomi masyarakat (Pebrian,dkk.2012).

Pengelolaan usaha ekonomi masyarakat berorientasi pada semangat kekeluargaan untuk membangun kesejahteraan bersama. Dalam upaya membangun usaha serta mengembangkannya, selain disatu sisi menjiwai semangat persaudaraan tapi disisi lain juga membutuhkan jiwa entrepreneurship (kewirausahaan), artinya bahwa pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dibutuhkan orang yang memiliki jiwa inovatif, kreatif serta berani mengambil resiko. Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu

strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik. Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi komitmen dan kebijakan semua departemen. Sebab sekali lagi, dimensi yang harus ditangani dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, bersifat multi. Sumodiningrat (1999), memberikan konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensidan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- 3) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:
 - (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya;
 - (2) penguatan kelembagaan;
 - (3) penguasaan teknologi; dan

- (4) pemberdayaan sumber daya manusia.
- 4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- 5) Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:
- (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal);
 - (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*;
 - (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - (4) penguatan industri kecil;
 - (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan
 - (6) pemerataan spasial

Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:

- (1) peningkatan akses bantuan modal usaha;
- (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan
- (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Enam butir pokok mengenai konsep pemberdayaan masyarakat ini, dapat disimpulkan, bahwa:

- (1) Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek;
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya;
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan

mendiskriminasikan ekonomi kuat; untuk itukemitraan antar usaha mikro, usaha kecil usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh;

- (4) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien; dan
- (5) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan (Suharyadi, 2007). Salah satu kriteria yang digunakan pada penilaian dalam evaluasi adalah hasil (*outcomes*) yaitu apakah terjadi perubahan indikator-indikator utama tujuan program (membaik atau tidak), berapa banyak perubahannya, serta apakah perubahan tersebut disebabkan oleh program. Evaluasi dampak dilakukan untuk mengkaji apakah suatu program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, masyarakat, dan kelembagaan.

Kegiatan evaluasi dalam pengembangan program UEK-SP merupakan proses untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, membantu dalam sistem perencanaan, penyusunan program dan sistem pengambilan keputusan yang bersifat antisipatif, sehingga di masa depan dapat dikembangkan program UEK-SP yang progresif dan dinamis. Dalam mengevaluasi kinerja program UEK-SP dapat dilakukan dengan melihat beberapa indikator diantaranya yaitu Sosial, Perdagangan, Peningkatan Pembangunan, Sumber daya manusia, Aspek organisasi, Aspek pengelolaan dana, dan Aspek usaha agribisnis (Pasaribu dkk, 2011).

Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk

diskriminatif dalam pemberian pinjaman. *Affirmative action* untuk masyarakat dalam pengembangan ekonomi, melalui mekanisme pasar ini jauh lebih baik, bila dibanding dengan pemberian dana bergulir. Ini relevan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat yang akan menjadikan ekonomi rakyat sebagai ekonomi yang tangguh, mandiri, berdaya saing, dan modern.

1) Bantuan Pembangunan Prasarana.

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran.

Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

2) Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat.

4) Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu

akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usahabersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

5) Penguatan Kemitraan

Usaha Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

2.2. Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati (Eko, 2002).

Adapun tujuan dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa atau

kelurahan.

- b. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa atau kelurahan yang berpenghasilan rendah.
- c. Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa atau kelurahan.
- d. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir.
- e. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan dana usaha desa atau kelurahan.
- f. Meningkatkan kebiasaan gotong royong gemar menabung secara tertib.
- g. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa atau kelurahan.
- h. Memenuhi kebutuhan sasaran atau prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa atau kelurahan.

Sementara sasaran yang akan dicapai dalam program pemberdayaan kelurahan kegiatan ini adalah:

- a. Berkembangnya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kelurahan atau kelurahan yang sehat dan berdaya saing tinggi.
- b. Terpenuhnya kebutuhan dasar sarana dan prasarana penunjang ekonomi, pendidikan dan infrastruktur desa atau kelurahan melalui pembangunan yang tumbuh dari bawah (*bottom up*) yang diimplementasikan oleh seluruh dinas instansi sektoral baik provinsi maupun kabupaten atau kota.
- c. Melembagakan sistem perencanaan partisipatif lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota melalui peran aktif dinas dan sektoral, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

2.3. Kasus-Kasus Program Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu nama program terbaru untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini akan dilaksanakan tahun 2007. Anggaran yang disediakan untuk PNPM adalah Rp 3,4 triliun dan penggunaannya antara lain untuk pembangunan infrastruktur, jaminan kesehatan dan pendidikan PNPM sebagaimana diketahui adalah

kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Untuk P2KP, oleh pemerintah sejak tahun 1999 telah digulirkan dana 3 (tiga) kali yang bersumber dari pihak Bank Dunia. Masing-masing Rp 785 miliar, Rp 483 miliar dan Rp 492 miliar (Suara Karya, 30/11-2012)

Sejak krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia beberapa tahun yang lalu, berarti telah diluncurkan beberapa program penanggulangan kemiskinan. Program pertama dengan bantuan Bank Dunia adalah Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program ini diluncurkan BAPPENAS untuk meringankan beban penduduk miskin yang meningkat jumlahnya terutama akibat krisis tersebut. Penggunaan istilah jaring, ibarat orang mau jatuh, agar tidak terkapar maka digunakan jaring sebagai alat pengaman. Melalui program itu dikembangkan kegiatan padat karya yang dapat mempekerjakan banyak orang.

Pelaksanaan program PDMDKE di lapangan, melibatkan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) - lembaga bentukan orde baru yang menurut Felix Meye tidak pernah bekerja sepanjang usianya. Lembaga ini diberi tugas mengelola dana PDMDKE di setiap kelurahan. Melalui program ini, banyak masyarakat kecil yang mengajukan kredit melalui proposal sederhana dan meminta dana untuk pembangunan fisik dan sosial melalui usulan proyek. Melalui dana ekonomi, pemerintah berharap dana itu terus bergulir. Peminjam pertama diharapkan mengembalikan dana, karena calon peminjam lain begitu banyak.

Meski program itu tidak jelas keberhasilannya, pada tahun berikutnya Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah meluncurkan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sebagaimana disebut di atas. Pada buku penjelasan umum proyek ini disebutkan bahwa program yang akan dilaksanakan di perkotaan ini menganut pendekatan pemberdayaan (empowerment) sebagai suatu syarat menuju pembangunan yang berkelanjutan.

PDMDKE misalnya, setahun setelah program itu bergulir, tidak ada laporan seberapa jauh dana kegiatan usaha telah bergulir atau berapa banyak penduduk miskin yang menikmati kredit mikro itu. Begitu juga P2KP, sejauh ini tidak ada laporan pasti bagaimana P2KP berjalan dan seberapa efektif upaya mengangkat masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Juga tidak pernah ada laporan, evaluasi dan figur masyarakat atau penduduk miskin yang berhasil berkat

bantuan kredit mikro dari P2KP. Bahkan di sejumlah wilayah dana P2KP habis untuk pembangunan fisik dan sosial.

Sementara itu, PPMK yang masih terus bergulir dan mendapatkan suntikan dana setiap tahun dari pemerintah DKI menurut Meye dibayangi penyelewengan dan kredit macet akibat kenakalan masyarakat peminjam dan oknum anggota Dewan Kelurahan (Dekel) – lembaga yang disertai tugas mengelola dana PPMK. Banyak Dekel mengeluhkan kredit macet.

2.4. Kredit Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP)

UEK-SP adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat. Dengan adanya UEK-SP ditengah-tengah masyarakat desa diharapkan dapat membantu menyediakan modal usaha bagi pengelola usaha-usaha ekonomi produktif yang membutuhkan modal usaha, dengan memberikan pelayanan dan persyaratan mudah, ringan serta cepat. UEK-SP ini keberadaannya mendapat sambutan serta dukungan dari masyarakat karena dipandang cukup memberikan andil dalam pengembangan ekonomi masyarakat terutama bagi golongan-golongan lemah atau masyarakat miskin.

Pada dasarnya dana UEK-SP terbuka terhadap segala usulan kegiatan ekonomi masyarakat. Prioritas jenis kegiatan yang dapat dibiayai dari dana UEK-SP diberikan kepada kegiatan yang menyejahterakan dan melibatkan banyak masyarakat miskin. Dana UEK-SP secara garis besar digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Kegiatan usaha ekonomi produktif desa/kelurahan diklasifikasikan sebagai kegiatan non infrastruktur yang mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga dan atau kelompok usaha (BPPM Riau, 2013).

Ruang lingkup kegiatan UEK-SP adalah mensosialisasikan dana UEK-SP kepada masyarakat, mempersiapkan masyarakat sebagai penerima dana UEK-SP, mengelola dana UEK-SP serta mengatur perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dana UEK-SP diberikan melalui pendekatan pelimpahan pengelolaan program dari tingkat propinsi dan kabupaten ke tingkat Desa/Kelurahan dengan pembinaan dari tingkat propinsi dan kabupaten yang pengelolaannya dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut: 1) dapat dimanfaatkan langsung oleh kelompok masyarakat maupun secara individu serta melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan, 2) usulan kegiatan harus dibahas melalui forum musyawarah desa/kelurahan sebagai forum tertinggi untuk mengambil keputusan desa/kelurahan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim verifikasi usulan. Pengelolaan dana ini harus transparan (terbuka) termasuk dalam hal usulan, pemilihan pengurus, pengelolaan serta penyaluran dana. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Usaha /Kelurahan harus diketahui oleh seluruh masyarakat setempat dengan mudah dan terbuka, disebarluaskan melalui papan informasi, selebaran, pertemuan-pertemuan dan melalui media lainnya (BPPM Riau, 2013).

Secara Umum Tugas dan Tanggungjawab Pengelola UEK-SP adalah :

- a. Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada masyarakat desa/kelurahan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat desa/kelurahan.
- b. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- c. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen serta menyalurkan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan kepada penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- d. Mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan serta dana simpan pinjam masyarakat.
- e. Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- f. Menyusun RKTL tahunan dan bulanan yang difasilitasi oleh Pendamping Desa.
- g. Pengelola UEK-SP melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin selanjutnya diberikan pinjaman.
- h. Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal masyarakat.

Pengelola UEK-SP terdiri dari minimal 4 Orang yaitu, Ketua, Kasir, Tata Usaha dan Staf Analisis Kredit dengan uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing sebagai berikut :

1. Ketua UEK-SP

Ketua UEK-SP mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Memimpin organisasi UEK-SP.
- b. Memberikan pinjaman yang diajukan calon peminfaat kepada UEK-SP berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa/Kelurahan II/Perguliran yang memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.
- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman dana UEK-SP.
- d. Mengawasi perputaran dana UEK-SP.
- e. Mengangkat tenaga Administrasi bila dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan UEK-SP.
- f. Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin bulanan bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan serta Pendamping Desa.
- g. Melakukan koordinasi dengan Aparat Desa/Kelurahan, BPD, Lembaga kemasyarakatan, Pendamping Desa, Koordinator Daerah, Kader Pembangunan Masyarakat serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka menyampaikan laporan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- h. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan lembaga UEK-SP.
- i. Melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban dana setiap periode pinjaman kepada masyarakat.
- j. Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada masyarakat.
- k. Menandatangani spesiment rekening UEK-SP dan rekening Simpan Pinjam pada Bank yang ditunjuk.
- l. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota peminfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan difasilitasi oleh Pendamping Desa

- m. Melaksanakan Pertanggungjawaban tahunan melalui “**Musyawarah Desa / Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan**” (MD/KPT/MKPT)
- n. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana UEK-SP sesuai aturan Pedum dan Juknis serta aturan yang berlaku.
- o. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Desa.

2. Kasir UEK-SP

Kasir UEK-SP mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.
- b. Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan UEK-SP.
- c. Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua UEK-SP secara periodic tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan.
- d. Menandatangani spesiment rekening UEK-SP dan rekening Simpan Pinjam pada Bank yang ditunjuk.
- e. Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan difasilitasi oleh Pendamping Desa.
- f. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di bank.
- g. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Desa.

3. Tata Usaha UEK-SP

Tata Usaha mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Berfungsi sebagai Sekretaris.
- b. Membantu dibidang keuangan.
- c. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Desa.
- d. Membantu dibidang administrasi umum UEK-SP.
- e. Menginformasi laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan pada papan informasi secara rutin dan mutakhir.

- f. Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan permasalahan tepat waktu serta disampaikan kepada Ketua UED/K.
- g. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- h. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan difasilitasi oleh Pendamping Desa.
- i. Bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan UEK-SP serta administrasi lainnya.

4. Staf Analisis Kredit

Staf Analisis Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada UEK-SP.
- b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi :
- c. Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha),
- d. Cek fisik kelayakan agunan,
- e. Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam (karakter calon pemanfaat),
- f. Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.
- g. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
- h. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.
- i. Melakukan umpan balik pada calon peminjam.

Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus yang terdiri dari Otoritas DUD, Kader Pembangunan Masyarakat, Pengawas Umum, Pengelola UEK-SP dan Pendamping Desa.

2.3. Analisis Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.3.1. Pendapatan usaha

Pendapatan usaha adalah hasil akhir dari suatu proses produksi, dimana produksi dinilai berdasarkan omset penjualan yaitu jumlah produksi yang terserap dipasar atau produk total yang terjual dikalikan dengan harga masing-masing produk dengan satuan rupiah. Pendapatan usaha suatu barang sangatlah berbeda-

beda, hal itu sangat tergantung pada minat para konsumen dalam membeli suatu barang. Semakin dibutuhkan barang tersebut semakin meningkat pendapatan usaha karena produksi yang terjual dipasar semakin banyak untuk melaksanakan kegiatan produksi tersebut tentu saja perlu dibuat suatu perencanaan yang menyangkut apa yang akan diproduksi, berapa anggarannya dan bagaimana pengendalian atau pengawasannya.

Bahkan harus perlu difikirkan, kemana hasil produksi akan didistribusikan, karena pendistribusian dalam bentuk penjualan hasil produksi pada akhirnya merupakan penunjang untuk kelanjutan produksi. Pada hakikatnya kegiatan produksi akan dapat dilaksanakan bila tersedia faktor-faktor produksi, antara lain yang paling pokok adalah berupa orang atau tenaga kerja, uang atau dana, bahan-bahan baik bahan baku maupun bahan pembantu dan metode.

2.3.2. Penyerapan Tenaga Kerja

Perekonomian di kebanyakan negara berkembang bahkan di beberapa negara maju adalah fenomena jumlah dan tingginya peningkatan penduduk yang bekerja di sektor informal. Hal ini didorong oleh tingkat urbanisasi yang tinggi dimana penawaran pasar tenaga kerja mampu direspon oleh permintaan tenaga kerja sektor informal.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja dalam penelitian ini adalah tenaga kerja sektor informal. Sektor informal adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (*job security*), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum.

Perencanaan tenaga kerja adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh wiraswasta guna menjamin bahwa tersedia tenaga kerja yang dapat diberdayakan selain dirinya sendiri sebagai seorang wirausaha.

2.4. Penelitian Terdahulu

Parikha (2007) dengan judul Studi Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa secara umum proses kegiatan PNPM- PPK di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal pada tahun 2007 telah berjalannya lancar dan sesuai dengan prosedur yang ada. Namun keberhasilan proses tersebut tidak diiringi dengan keberhasilan tujuan utamanya yaitu pengentasan kemiskinan. Karena kenyataan di lapangan hanya sebagian masyarakat yang dapat memanfaatkan bantuan sehingga dapat meningkatkan penghasilannya. Dengan demikian PNPM-PPK kurang berhasil dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah kelurahan.

Untuk kegiatan ekonomi berupa pemberian bantuan modal untuk usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam, telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Melalui bantuan kegiatan fisik dan ekonomi maka PPK sebagai salah satu program yang berbasis pemberdayaan, akan memberikan kemudahan akses sosial ekonomi yang pada akhirnya memberikan kondisi perbaikan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Walaupun belum dapat dikatakan dengan adanya pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo telah mampu mengubah secara langsung dan dalam waktu yang singkat terhadap tingkat kemiskinan namun dimungkinkan akan mendorong ke kehidupan yang lebih baik dan secara pelan namun pasti terwujud. Pada akhirnya PPK harus dipertahankan sebagai sebuah program pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan partisipatif.

Otto Dwana Sagala (2009) dengan judul Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelurahan (Program Pemberdayaan kelurahan) Terhadap Pengembangan Sosio-Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samusir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelurahan (Program Pemberdayaan kelurahan) di Kecamatan Balige belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik. Sarana dan prasarana fisik dibangun belum menjadi prioritas utama. Hal ini karena tidak jelas manfaat serta pemanfaatnya. Tingkat partisipasi masyarakat belum datang dari hati nurani tetapi masih digerakkan oleh tokoh-tokoh (*informal leader*) yang ada di desa tersebut. Dampak Program Pemberdayaan kelurahan terhadap kondisi sosio ekonomi pendapatan

dan pendidikan masyarakat sebelum dan sesudah adanya Program Pemberdayaan kelurahan berbeda nyata secara positif.

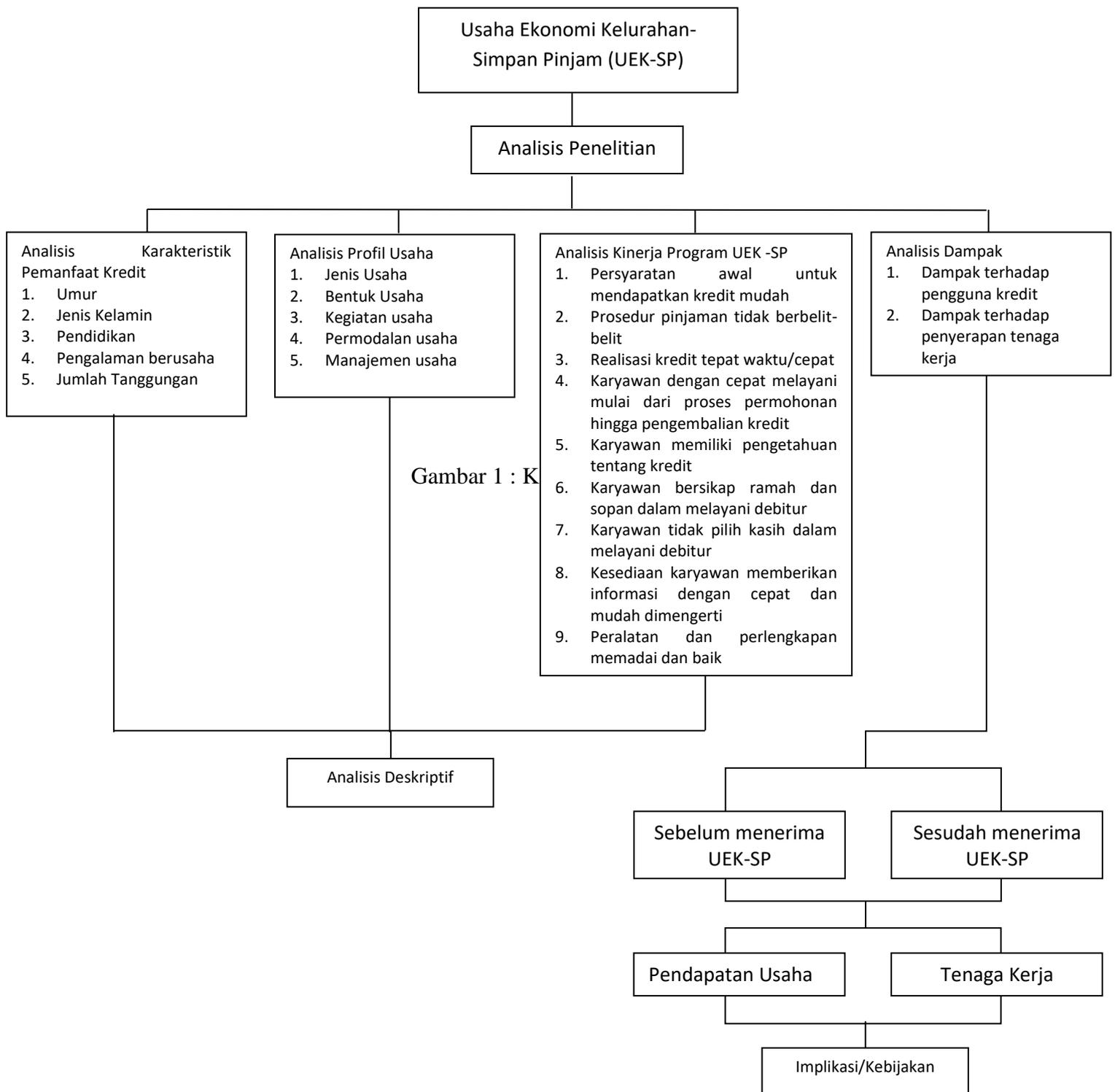
Ratih Twidaryati (2010) dengan judul Analisis Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelurahan (Program Pemberdayaan kelurahan) Di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan rata-rata jumlah produktivitas hipotesis 1 terbukti, (2) terdapat perbedaan rata-rata penghasilan perbulan yang positif secara signifikan antara sebelum dengan setelah adanya Program Pemberdayaan kelurahan, dengan demikian hipotesis 2 terbukti, dan (3) terdapat perbedaan rata-rata jumlah tenaga kerja yang positif secara signifikan antara sebelum dengan setelah adanya PNPM, dengan demikian hipotesis 3 terbukti. Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut (1) anggota kelompok UPPKS penerima dana Program Pemberdayaan kelurahan di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen mayoritas adalah perempuan dengan pendidikan yang masih rendah yaitu SLTP, (2) anggota kelompok UPPKS penerima dana Program Pemberdayaan kelurahan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja, produktivitas dan penghasilan, (3) adanya perbedaan jumlah tenaga kerja, produktivitas dan penghasilan anggota kelompok UPPKS di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen sebelum dengan setelah adanya Program Pemberdayaan kelurahan.

2.5. Kerangka Pemikiran

Dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah program yang memfokuskan masyarakat ekonomi lemah di kelurahan sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan. Pengalokasian dana UEK-SP yang diterima petani padi sawah adalah untuk penggunaan input produksi yaitu pupuk, pestisida, herbisida, upah tenaga kerja, sewa alat, bunga modal, dan angsuran serta biaya angkut.

Adapun tingkat keberhasilan pengelolaan UEK-SP ini salah satu indikatornya adalah pengembalian kredit oleh anggotanya. Dalam pengembalian kredit oleh anggotanya faktor-faktor karakteristik apa saja yang mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit.

Faktor-faktor yang dimungkinkan berpengaruh terhadap pengembalian kredit UEK-SP yaitu: (1) jumlah anggota keluarga (jiwa), (2) pendidikan (tahun), (3) umur (tahun), (4) pendapatan usahatani (Rupiah/musim tanam) (5) pengalaman usahatani (tahun), dan (6) besar pinjaman (Rupiah). Kerangka berpikir dapat dilihat pada Gambar 1.



2.6. Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga program Program Pemberdayaan kelurahan meningkatkan pendapatan usaha anggota Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.
2. Didiuga program Program Pemberdayaan kelurahanmeningkatkan jumlah tenaga kerja Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode, Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survey yang bertempat di Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Dipilihnya Kelurahan ini sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa :

- 1) Kelurahan ini merupakan salah satu yang mendapatkan kucuran dana program Usaha Ekonomi Kelurahan.
- 2) Data yang berkenaan dengan UEK-SP tersebut relatif tersedia.
- 3) Belum pernah penelitian sebelumnya tentang dampak program Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) terhadap usaha ekonomi pemanfaat kredit.

Waktu penelitian ini direncanakan 4 bulan yakni bulan Agustus-Desember 2014 yang meliputi persiapan, pembuatan proposal, pengumpulan data lapangan, tabulasi data, analisis data dan pelaporan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.2. Teknik Pengambilan Sampel

Populasinya dalam penelitian ini adalah pemanfaat kredit UEK-SP yang sudah mendapatkan pencairan kredit. Jumlah pemanfaat kredit UEK-SP Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru sampai bulan Februari 2014 adalah 648 orang pemanfaat kredit terdiri dari laki-laki berjumlah 365 dan perempuan berjumlah 283 orang.

Besarnya jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 86 orang pemanfaat kredit UEK-SP, berdasarkan metode Slovin dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi yaitu 10%.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari dua sumber, yakni:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari Pemanfaat Kredit yaitu pemanfaat kredit UEK-SP kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Adapun data primer yang akan dikumpulkan meliputi :

- a) Karakteristik pemanfaat kredit meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman berusaha, jumlah tanggungan, dan Profil Pemanfaat Kredit meliputi pengalaman berusaha dan besar pinjaman.
- b) Analisa Usaha meliputi jenis usaha, bentuk usaha, kegiatan usaha, permodalan usaha, dan manajemen usaha.
- c) Kinerja Program UEK-SP meliputi indikator kegiatan yang dilakukan, persyaratan awal untuk mendapatkan kredit mudah, prosedur peminjaman tidak berbelit-belit, realisasi kredit tepat waktu, karyawan dengan cepat melayani mulai dari proses permohonan hingga pengembalian kredit, karyawan bersikap ramah dan sopan dalam melayani pemanfaat kredit/kreditur, karyawan tidak pilih kasih dalam melayani debitur, kesediaan karyawan memberikan informasi dengan tepat mudah dimengerti, kebersihan dan kenyamanan bank penyalur, penataan taman keasrian bak penyalur, peralatan dan perlengkapan memadai bank..
- d) Data Pendapatan Usaha, jumlah tenaga kerja dan pendapatan.
- e) Mekanisme pelaksanaan program.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data baik dari internal maupun eksternal yang diperoleh seperti pedoman kerja UEK-SP, modul-modul Program pemberdayaan desa/kelurahan, dan lain-lain. Data-data tersebut akan diperoleh di Kantor Desa maupun di tingkat Kecamatan yang terkait dengan penelitian ini.

3.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pemanfaat kredit yang menggunakan dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). Jenis Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) meliputi usaha yang bergerak pada bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil, dan jasa.

3.5. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda dari istilah atau variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka dibuat batasan-batasan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Dampak

Pengertian dampak menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2014)

2. Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam

Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam adalah suatu program pengembangan sumber daya manusia yang akan mendidik dan mengarahkan para nasabah tersebut, agar mau dan mampu menjangkau fasilitas dan kemudahan-kemudahan pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.

3. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya

4. Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha adalah hasil akhir proses produksi ataupun usaha yang dilakukan oleh anggota simpan pinjam. Dalam penelitian ini produksi dinilai

dari jumlah produksi yang terserap atau produk total terjual dipasar dikalikan dengan harga masing-masing. Satuan yang digunakan adalah rupiah.

5. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang ikut terlibat dalam proses kegiatan usahanya. Satuan yang digunakan adalah jumlah orang yang terlibat dalam proses usaha.

3.6. Metode Analisis Data

3.6.1. Analisis Karakteristik dan Profil Pemanfaat Kredit

Data karakteristik pemanfaat kredit dan profil usaha diperoleh dari kuesioner. Data karakteristik pemanfaat kredit yang ingin diketahui adalah umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman berusaha, dan jumlah tanggungan. Data profil usaha yang ingin diketahui adalah jenis usaha, bentuk usaha, kegiatan usaha permodalan dan manajemen usaha. Data karakteristik pemanfaat kredit dan profil usaha disajikan ke dalam tabel kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

3.6.2. Analisis Profil Usaha Pemanfaat Kredit UEK-SP

Data usaha pemanfaat UEK-SP yang ingin diketahui adalah jenis usaha, bentuk usaha, kegiatan usaha, permodalan usaha, dan manajemen usaha. Data usaha pemanfaat kredit UEK-SP disajikan ke dalam tabel kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

3.6.3. Analisis Kinerja Program UEK-SP

Data kinerja UEK-SP yang ingin diketahui adalah evaluasi pelaksanaan pemberian kredit, dan serta dana yang dikucurkan, kepuasan penerima kredit dari aspek pelayanan dan pendapatan jumlah kredit. Data kinerja UEK-SP disajikan ke dalam tabel kemudian dianalisis.

Tabel 2: Operasional Variabel Penelitian

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR
Zeithami (1990:21) mengatakan bahwa Pelayanan nasabah bukan	Tangibles	Persyaratan awal untuk mendapatkan kredit mudah Prosedur peminjaman tidak

hanya sekedar melayani tapi juga harus memperhatikan kepuasan yang dirasakan oleh nasabah. Dalam memberikan penilaian dalam pelayanan/jasa yang diterimanya, pelanggan menggunakan sepuluh dimensi orisinil sebagai indikator penentu dalam menentukan kualitas pelayanan.		berbelit-belit
	Access	Peralatan dan perlengkapan memadai dengan baik.
		Kesediaan karyawan memberikan informasi dengan tepat dan mudah dimengerti.
	Reliability	Realisasi kredit tepat waktu
	Responsiveness	Karyawan dengan cepat melayani mulai dari proses permohonan hingga pengembalian kredit.
	Competence	Karyawan memiliki pengetahuan tentang kredit.
	Courtesy	Karyawan bersikap ramah dan sopan dalam melayani nasabah/kreditur.
Understanding the Customers	Karyawan bank tidak pilih kasih dalam melayani debitur.	

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan pertanyaan yang bersifat tertutup, yakni sebuah pertanyaan yang sudah disediakan jawaban untuk dipilih Pemanfaat Kredit.

3.6.4. Analisis Dampak Program UEK-SP terhadap Pemanfaat Kredit

Data dampak UEK-SP terhadap pemanfaat kredit diperoleh dari kuesioner. Data yang ingin diketahui adalah dampak UEK-SP terhadap pendapatan usaha dan tenaga kerja penerima kredit UEK-SP disajikan ke dalam tabel kemudian dianalisis secara statistik. Data yang digunakan adalah data kredit penerima kredit UEK-SP dari tahun 2007-2013.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji beda mean. Uji beda dua mean untuk mengetahui perbedaan rata-rata Pendapatan Usaha, tenaga kerja dan penghasilan yang diperoleh anggota kelompok simpan pinjam (UEP) sebelum dan setelah adanya program Program Pemberdayaan

Kelurahan. Statistik uji yang digunakan adalah Uji Z dengan prosedur sebagai berikut :

$$Z_{hitung} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Keterangan :

\bar{X}_1 = Rata-rata Pendapatan Usaha dan tenaga kerja setelah pelaksanaan program

\bar{X}_2 = Rata-rata Pendapatan Usaha dan tenaga kerja sebelum pelaksanaan program

n_1 = Banyaknya sampel kelompok setelah Program Pemberdayaan Masyarakat

n_2 = Banyaknya sampel kelompok sebelum Program Pemberdayaan Masyarakat

s = Standar deviasi

3.7. Validitas Instrumen dan Reliabilitas Instrumen

Instrumen yang baik adalah instrumen yang memenuhi dua persyaratan yang penting, yaitu valid dan reliabel. Oleh karena itu, perlu diadakan uji validitas dan reliabilitas terhadap hasil uji coba untuk memperoleh keakuratan data telah terkumpul.

1. Validitas Instrumen (Uji Validitas)

Priyatno (2008:16), menyatakan bahwa "Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan/kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid /sahih memiliki validitas tinggi." Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2002:145). Untuk mengetahui validitas instrumen, maka digunakan rumus *Product Moment* sebagai berikut:

Rumus I: dengan nilai simpangan

$$r = \frac{n \sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{\{n \sum i^2 - (\sum i)^2\} \{n \sum x^2 - (\sum x)^2\}}}$$

Keterangan:

R_{ix} = Koefisien korelasi item-total

i = skor item

x = skor total

n = jumlah subjek uji coba

Untuk mengatasi validitas instrumen pada penelitian ini, digunakan program *SPSS 17.0 for windows*. Hasil setiap tes butir soal dianggap valid jika memenuhi kriteria penggunaan rumus ini, yaitu apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir soal instrumen tersebut dikatakan valid, dan jika sebaliknya $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka, instrumen tersebut tidak valid.

2. Reliabilitas Instrumen (Uji Reliabilitas)

Selain valid, instrumen penelitian juga harus reliabel. Menurut Duwi Prayitno (2008:25) reliabilitas digunakan untuk mengetahui alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Arikunto (2002:154) menjelaskan bahwa "Sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sehingga alat pengumpulan data sudah baik." Untuk mencari koefisien reliabilitas digunakan rumus alpha:

$$r_n = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \partial^2 - 1}{\partial^2 1} \right]$$

Ket :

R_n = reliabilitas yang dicari

K = banyaknya butir soal

$\sum \partial^2 1$ = jumlah varian skor tiap butir

Dasar pengambilan keputusan;

- Jika $r_{alpha} > r_{tabel}$, maka butir atau variabel tersebut reliabel
- Jika, dan $r_{alpha} < r_{tabel}$, maka butir atau variabel tersebut tidak reliabel

Uji reliabilitas ini menggunakan bantuan program *SPSS 17.0 for windows*. Kriteria penggunaan rumus ini, apabila nilai Alpha lebih besar dari nilai r_{tabel} , maka tes tersebut dapat dikatakan reliabel. Sebaliknya apabila nilai Alpha lebih kecil dari nilai r_{tabel} , maka tes tersebut dapat dikatakan tidak reliabilitas.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Biaya Penelitian

Total biaya yang diusulkan adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Adapun ringkasan anggaran biaya dalam kegiatan ini dijelaskan pada table berikut ini:

Tabel 4.1

Ringkasan Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Honorium	2.500.000
2	Pembelian Bahan Habis Pakai dan Peralatan	750.000
3	Perjalanan	1.500.000
4	Sewa dan Pajak	1.250.000
5.	Biaya Publish	2.000.000
Jumlah		8.000.000

4.2. Jadwal Kegiatan

Penelitian ini direncanakan berlangsung 1 tahun. Rencana program ini tertera pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan	triwulan I	triwulan II	triwulan III
1.	Persiapan pelaksanaan kegiatan dan pengurusan izin	■		
2.	Melakukan penelitian	■		
3.	Ngolah data dan Analisis data		■	
4.	Hasil			■
5.	Pembahaasan			■

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Reineka Cipta.
- Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik dan Depsos, 2002, *Penduduk Fakir Miskin Indonesia*, Jakarta : BPS
- Bappenas, 2004. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta
- Budiono. 1992. *Ekonomi Moneter : Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekanomi*. No.2, Yogyakarta : BPFE.
- Cox, David, 2004, "Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in commit to user the Asia-Pacific Region" makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia,, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret
- Hidayat, 2007, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Umar,Husein. 2004, *Metode Riset Pemasaran Jasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. Utama
- IAI ,2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat. Loekman Sutrisno.2003. *Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan; dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Editor: Awan Setya Dewanta. Yogyakarta : Aditya Media.
- Hutomo,MY. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Seminar Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta
- Parikha. 2007. Studi Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2007. *Tesis*. Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pasaribu dkk. (2011). *Penentuan Desa Calon Lokasi PUAP 2011 dan Evaluasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.
- Pebrian,Sispa.dkk.2012.Pengaruh Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (Ppd) Terhadap Keberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi.*SEPA : Vol. 9 No.1 September 2012 :64 – 73*.
- Prayitno, Duwi. 2008. *Belajar Mandiri SPSS*. Jakarta: PT. Buku Kita

- Priyono dan Pranaka, 1996. *Pemberdayaan Mengandung Dua Kecenderungan*, commit to user Jakarta : Gramedia
- Riduwan. 2006. *Dasar-dasar Statistika*. Bandung : Alfabeta
- Sudarwan Danim, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Suharto, dkk, 2004, *Dimensi Kemiskinan*, SMER
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999. *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Warih Budiyo Setyawan. 2008. Evaluasi Proses Pelaksanaan program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. *Tesis*. Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suryahadi, Asep. (2007). *Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan*. Modul 4 : Persyaratan dan Unsur-unsur Evaluasi yang Baik. Bappenas. Jakarta. www.ditpk.bappenas.go.id
- Winardi. 1992. *Kamus Istilah Ekonomi-Inggris-Belanda-Indonesia*. Jakarta : PT Bina. Aksara
- Zeithaml, V., Parasuraman, A., Berry, L (1990) *Delevery Quality Service Balancing Customer Perception and Expectation*, USA :Free Pres Collier Macmillan Publisher

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73/2005 tentang Kelurahan.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

